BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada aparatur desa di Kecamatan Lebakwangi dan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, dan tanggung jawab aparatur desa dalam menjalankan tugasnya, maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.
2. Transparansi pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa.
3. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, keadaan ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam musyawarah, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan evaluasi program desa dapat membantu pemerintah desa dalam menciptakan pengelolaan Dana Desa yang lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara deskriptif responden menilai pemanfaatan teknologi

sudah berada pada kategori baik hingga sangat baik, penilaian tersebut belum tercermin dalam peningkatan akuntabilitas secara signifikan. Kondisi ini dapat terjadi karena pemanfaatan teknologi belum terintegrasi secara konsisten dalam seluruh proses pengelolaan dana desa serta belum didukung oleh prasarana yang memadai dan merata di setiap desa.

5. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan, pemisahan tugas, kepatuhan terhadap prosedur, pencatatan yang tertib, dan evaluasi yang berkelanjutan dapat membantu mencegah penyimpangan serta meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa diharapkan dapat terus meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam mengelola Dana Desa, peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berkala mengenai penyusunan anggaran, pencatatan keuangan, pelaporan, serta pemahaman terhadap aturan pengelolaan Dana Desa, dengan adanya pembinaan tersebut, aparatur desa akan lebih siap dalam menjalankan tugas dan lebih mampu mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran.
2. Pemerintah desa perlu memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat agar pengelolaan Dana Desa dapat lebih mudah diawasi, informasi mengenai rencana anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban sebaiknya disampaikan melalui papan informasi desa, musyawarah desa, media sosial resmi desa, atau media komunikasi lain yang mudah dijangkau oleh masyarakat, melalui penyampaian informasi yang jelas, masyarakat dapat mengetahui penggunaan Dana Desa dan kepercayaan terhadap pemerintah desa dapat meningkat.

3. Masyarakat sebaiknya diberikan ruang yang lebih luas untuk terlibat dalam pengelolaan Dana Desa, keterlibatan tersebut dapat dibangun dengan mengundang masyarakat dalam musyawarah desa, memberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, serta melibatkan warga dalam pengawasan kegiatan pembangunan, apabila masyarakat ikut berperan sejak tahap perencanaan sampai evaluasi, maka program desa akan lebih sesuai dengan kebutuhan warga dan pengelolaan Dana Desa menjadi lebih akuntabel.
4. Pemerintah desa perlu memastikan pemanfaatan teknologi yang sudah dinilai baik oleh aparatur dapat diintegrasikan secara konsisten dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih dalam bentuk pelatihan berkelanjutan, pendampingan teknis, serta pemerataan prasarana pendukung seperti jaringan internet yang stabil, sehingga teknologi tidak hanya digunakan sebagai sarana administrasi, tetapi juga dapat mendukung transparansi, ketepatan pelaporan, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara lebih efektif.
5. Sistem pengendalian internal pada pemerintah desa perlu diperkuat agar penggunaan Dana Desa berjalan sesuai aturan, penguatan ini dapat dilakukan dengan membagi tugas aparatur secara jelas, melakukan pemeriksaan dokumen sebelum pencairan anggaran, mencatat setiap transaksi dengan tertib, serta melakukan evaluasi kegiatan secara berkala, dengan pengawasan yang lebih teratur, kesalahan administrasi maupun penyimpangan anggaran dapat lebih mudah dicegah.